BAB II

DASAR TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1. Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan laporan terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas. Laporan keuangan menjadi bentuk pertanggungjawaban atas penggunaan sumber daya ekonomi oleh suatu entitas. Mahsun, dkk. (2011) mendefinisikan laporan keuangan sebagai berikut:

“laporan keuangan merupakan hasil dari proses akuntansi yang berisi informasi keuangan. Informasi keuangan yang terdapat dalam laporan keuangan tersebut digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan, baik pihak internal maupun eksternal.”

Laporan keuangan adalah laporan yang dibuat saat ini maupun dalam suatu periode tertentu yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan (Kasmir, 2015). Adapun Soemarsono (2004) mendefinisikan laporan keuangan yaitu laporan yang dirancang untuk para pembuat keputusan dan pihak eksternal perusahaan mengenai posisi keuangan dan hasil usaha perusahaan. Laporan keuangan yang disusun dan dilaporkan diharapkan dapat membantu pihak yang membutuhkan informasi dalam laporan keuangan dan dapat menilai seberapa efektif dan efisien hasil kinerja suatu entitas.

2.1.1. Tujuan Laporan Keuangan

Adapun tujuan pelaporan keuangan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan bahwa pelaporan keuangan pemerintah seharusnya menyajikan informasi yang

bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan:

1. Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan.
2. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran.
3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai.
4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan menandai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.
5. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman.
6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

2.1.2. Komponen Laporan Keuangan

Berikut adalah komponen laporan keuangan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan.

2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL)

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

3. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.

4. Laporan Operasional (LO)

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.

5. Laporan Arus Kas (LAK)

Laporan Arus Kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah pusat/daerah selama periode tertentu.

6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Laporan Arus Kas.

2.2. Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

2.2.1. Pengertian Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Sunyoto (2012) mendefinisikan kualitas sebagai berikut:

“Kualitas adalah suatu ukuran untuk menilai bahwa suatu barang atau jasa telah mempunyai nilai guna seperti yang dikehendaki dengan kata lain suatu barang atau jasa dianggap memiliki kualitas apabila berfungsi atau mempunyai nilai guna seperti yang diinginkan.”

Sesuatu dikatakan berkualitas jika telah memenuhi standar atau prasyarat tertentu dimana hal tersebut dinilai melalui hasil pertanggungjawaban, baik yang berwujud seperti barang maupun tidak berwujud seperti jasa atau suatu kegiatan. Begitupun dengan pengelolaan pertanggungjawaban oleh pemerintah daerah melalui laporan keuangan, dikatakan berkualitas apabila telah memenuhi standar yang berlaku pada masing-masing pemerintah daerah.

Diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menyatakan bahwa laporan keuangan merupakan laporan terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan entitas pelaporan. Harahap (2009) mengemukakan bahwa kualitas laporan keuangan merupakan suatu kriteria laporan akuntansi keuangan yang dapat memberi keyakinan bagi para pembaca dan pengguna laporan keuangan. Laporan keuangan yang dilaporkan diantaranya adalah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

Dalam menyusun dan melaporkan hasil kinerja pemerintah daerah dalam bentuk laporan keuangan perlu untuk memperhatikan kualitas dari laporan keuangan tersebut. Kualitas dari laporan keuangan merupakan cerminan dari kinerja pemerintah daerah atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Hal ini juga menjadi penilaian bagi masyarakat apakah pemerintah daerah telah melakukan tugas dan fungsi dalam pengelolaan sumber daya dan keuangan daerah dengan baik. Kinerja pemerintah daerah yang baik tercermin dari kualitas laporan keuangan daerah yang baik, namun sebaliknya kinerja pemerintah daerah yang kurang baik, tercermin pula dari kualitas laporan keuangan yang kurang baik.

2.2.2. Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan

Karakteristik kualitatif laporan keuangan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 yang menyatakan bahwa karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya.

Berikut adalah empat karakteristik agar laporan keuangan memenuhi kualitas yang dikehendaki:

1. Relevan

Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu.

2. Andal

Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi.

3. Dapat Dibandingkan

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya.

4. Dapat Dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna.

Keempat karakteristik kualitatif laporan keuangan di atas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 akan digunakan sebagai indikator untuk

mengukur kualitas LKPD menggunakan kuesioner yang dimodifikasi dari penelitian Triyanti (2017).

2.3. Sistem Pengendalian Internal

Dalam menjalankan setiap tugas dan tanggung jawab baik di sebuah entitas maupun dalam instansi pemerintah tentunya diperlukan pengendalian internal untuk mengatur dan mengendalikan segala kegiatan yang dilakukan. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 mendefinisikan Sistem Pengendalian Intern sebagai berikut:

“Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset Negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.”

Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan yang disingkat SPIP merupakan Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Menurut Mulyadi (2013) bahwa Sistem Pengendalian Intern meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. SIP yang baik akan mampu dalam memprediksi adanya kesalahan serta penyelewengan dalam batas-batas yang layak.

Berikut adalah unsur-unsur dalam Sistem Pengendalian Intern dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 yaitu:

1. Lingkungan Pengendalian

Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan Sistem Pengendalian Intern dalam lingkungan kerjanya.

2. Penilaian Risiko

Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan penilaian risiko yang terdiri dari:

a. Identifikasi Risiko

Identifikasi risiko dilaksanakan dengan menggunakan metode yang sesuai, menggunakan mekanisme yang memadai, dan menilai faktor lain yang dapat meningkatkan risiko.

b. Analisis Risiko

Analisis risiko dilaksanakan untuk menentukan dampak dari risiko yang telah diidentifikasi terhadap pencapaian tujuan Instansi Pemerintah.

3. Kegiatan Pengendalian

Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi Instansi Pemerintah yang bersangkutan.

4. Informasi dan Komunikasi

Pimpinan Instansi Pemerintah wajib mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan informasi dalam bentuk dan waktu yang tepat.

5. Pemantauan Pengendalian Intern

Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan pemantauan Sistem Pengendalian Intern.

Kelima komponen Sistem Pengendalian Internal di atas menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 akan digunakan sebagai indikator untuk mengukur SIP menggunakan kuesioner yang dimodifikasi dari penelitian Triyanti (2017).

2.4. **Transparansi**

Definisi transparansi menurut Adrianto (2007) adalah keterbukaan secara sungguh-sungguh, menyeluruh dan memberi tempat bagi partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat dalam proses pengelolaan sumber daya publik. Transparansi merupakan keterbukaan dari pemerintah dalam membuat kebijaksanaan-kebijaksanaan keuangan daerah sehingga dapat diketahui dan diawasi oleh DPRD dan masyarakat (Mardiasmo, 2009). Didukung oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa transparan adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah. Dengan dilakukannya transparansi, maka publik akan memperoleh informasi yang aktual dan faktual.

Berikut adalah manfaat transparansi menurut Adrianto (2007):

1. Mencegah korupsi
2. Lebih mudah mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan kebijakan

3. Mengidentifikasi akuntabilitas sehingga masyarakat akan lebih mampu mengukur kinerja lembaga.
4. Meningkatkan kepercayaan terhadap komitmen lembaga untuk memutuskan kebijakan tertentu.
5. Menguatnya kohesi sosial, karena kepercayaan masyarakat terhadap lembaga.
6. Menciptakan iklim investasi yang baik dan meningkatkan kepastian usaha.

2.4.1. Karakteristik Transparansi

Mardiasmo (2009) mengemukakan bahwa terdapat tiga karakteristik transparansi sebagai berikut:

1. Informatif

Pemberian arus informasi, berita, penjelasan mekanisme, prosedur, data, fakta kepada *stakeholders* yang membutuhkan informasi secara jelas dan akurat.

- a. Tepat Waktu

Laporan keuangan harus disajikan tepat waktu agar dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi, sosial, politik, serta untuk menghindari tertundanya, pengambilan keputusan tersebut.

b. Memadai

Penyajian laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia mencakup dimuatnya pengungkapan informatif yang memadai atas hal-hal material.

c. Jelas

Informasi harus jelas sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman.

d. Akurat

Informasi harus bebas dari kesalahan-kesalahan dan tidak menyesatkan bagi pengguna yang menerima dan memanfaatkan informasi tersebut.

e. Dapat Dipertimbangkan

Laporan keuangan hendaknya dapat dibandingkan antar periode waktu dan dengan instansi yang sejenis.

f. Mudah Diakses

Informasi harus mudah diakses oleh semua pihak.

2. Keterbukaan

Keterbukaan informasi publik memberi hak kepada setiap orang untuk memperoleh informasi dengan mengakses data yang ada di badan publik dan menegaskan bahwa setiap informasi itu harus bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi.

3. Pengungkapan

Pengungkapan kepada masyarakat atau publik atas aktifitas dan kinerja finansial.

a. Kondisi Keuangan

Suatu atau keadaan secara utuh atas keuangan organisasi atau organisasi selama periode atas kurun waktu tertentu.

b. Susunan Pengurus

Struktur organisasi menunjukkan adanya pembagian kerja dan menunjukkan bagaimana fungsi-fungsi atau kegiatan yang berbeda.

c. Bentuk Perencanaan dan Hasil dari Kegiatan

Serangkaian tindakan untuk mencapai hasil yang diinginkan.

Ketiga karakteristik transparansi menurut Mardiasmo (2009) di atas akan digunakan sebagai indikator dalam mengukur transparansi dengan menggunakan kuesioner yang dimodifikasi dari penelitian Septiningtyas (2017).

2.5. Kompetensi Sumber Daya Manusia

Kompetensi dapat diartikan sebagai karakteristik yang menjadi dasar bagi seseorang dalam menghasilkan pekerjaan yang efektif dan kinerja yang unggul (Edison dkk., 2016). Kompetensi menjadi salah satu unsur penting agar pekerjaan yang dihasilkan menjadi maksimal. Hasil dari pekerjaan yang maksimal tidak lepas dari sumber daya manusia sebagai unsur pelaksana pekerjaan tersebut. Menurut Azhar (2007) sumber daya manusia adalah faktor utama sebagai penggerak roda organisasi dalam mencapai visi dan misi dan tercapinya tujuan organisasi.

Dalam suatu entitas maupun pemerintahan diperlukan adanya sumber daya manusia yang berkompeten yang memiliki ilmu serta wawasan yang luas. Kompetensi sumber daya manusia ialah suatu bentuk penggambaran pada manusia seperti ilmu, keterampilan, perilaku maupun pengalaman dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab serta bagiannya dalam suatu pekerjaan tertentu dengan efektif (Wirawan, 2009). Sumber daya manusia yang semakin berkompeten akan menghasilkan kinerja yang baik sehingga menghasilkan *output* yang maksimal.

Hutapea dan Thoha (2008) menyatakan bahwa terdapat tiga indikator untuk mengukur kompetensi sumber daya manusia:

1. Pengetahuan

Pengetahuan (*knowledge*) yaitu informasi yang dimiliki oleh seorang pegawai untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan bidangnya. Informasi yang dimiliki seorang pegawai tersebut dapat diwujudkan nyata dalam suatu pekerjaan. Pengetahuan seorang pegawai dapat menentukan berhasil tidaknya tugas yang di kerjakan. Seorang pegawai dengan pengetahuan yang cukup akan berkontribusi dalam meningkatkan efektifitas perusahaan.

2. Keterampilan

Keterampilan (*skill*) merupakan upaya seorang pegawai dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik dan maksimal. Contohnya kemampuan bekerja sama baik dengan individu lain maupun berkelompok untuk memahami dan memotivasi orang lain. Keterampilan sangat penting bagi seorang pegawai yang sudah

menduduki jabatan tertentu karena keterampilan berhubungan dengan keterampilan berkomunikasi, memotivasi, dan mendelegasi.

3. Sikap

Sikap (*attitude*) adalah pola tingkah seorang pegawai dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan perusahaan. Seorang pegawai apabila memiliki sikap dalam mendukung organisasi, maka secara otomatis akan melakukan tugas yang dibebankan dengan sebaik mungkin.

Ketiga komponen kompetensi sumber daya manusia menurut Hutapea dan Thoha (2008) di atas akan digunakan sebagai indikator untuk mengukur kompetensi sumber daya manusia yang dimodifikasi dari penelitian Wardani (2017).

2.6. Kerangka Konseptual

2.6.1. Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Jensen dan Meckling (1976) mendefinisikan teori agensi sebagai hubungan antara pemilik perusahaan (*principal*) dan manajer perusahaan (*agent*). *Principal* merupakan pihak yang memberikan wewenang dan *agent* adalah pihak yang menerima wewenang. Pemilik perusahaan (*principal*) akan mendelegasikan otoritas pembuatan keputusan kepada manajer (*agent*). Hubungan antara pihak *principal* dan *agent* tidak selalu baik dan bisa terjadi permasalahan seperti adanya asimetris informasi dan terjadinya konflik. Adanya ketidaksamaan tujuan antara pihak pemberi wewenang dengan pihak yang menerima wewenang yang dapat menimbulkan konflik tersebut.

Dalam penelitian ini yang menjadi pihak *principal* adalah masyarakat dan *agent* merupakan pemerintah daerah. *Agent* diberi wewenang untuk mengelola sumber daya publik dan membuat laporan kepada *principal* terkait dengan pengelolaan sumber daya publik tersebut. Pertanggungjawaban *agent* atas penggunaan sumber daya publik yaitu dengan melaporkan hasil kinerja dalam bentuk laporan keuangan kepada *principal*. Hal ini agar tidak terjadi asimetris informasi dimana pihak *agent* memiliki lebih banyak informasi dari *principal*. Pihak *principal* akan menilai hasil kinerja *agent* melalui laporan keuangan yang dibuat setiap tahun.

2.6.2. Hubungan Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Dalam PP No. 60 tahun 2008 mendefinisikan Sistem Pengendalian Intern sebagai suatu proses dari kegiatan oleh para atasan maupun pegawai-pegawai yang dilakukan terus menerus yang memberikan keyakinan dalam mencapai tujuan organisasi kemudian direalisasikan dalam bentuk aktivitas yang dilakukan dengan memperhatikan keefisienan dan keefektifitasan, menjaga laporan keuangan tetap andal, menjaga asset Negara, dan terus taat pada peraturan perundangan. Dalam pelaporan keuangan pemerintahan terkadang terjadi risiko salah saji material. Hal ini karena kurangnya kontrol terhadap pelaporan keuangan. Maka dari itu dibutuhkan adanya SPI untuk mengecek ketelitian serta keandalan data akuntansi.

Apabila dalam pelaksanaannya SPI diterapkan dengan baik oleh pemerintah daerah maka segala kegiatan yang dilakukan dapat terkoordinasi

dengan baik. Kegiatan yang terkoordinasi dengan baik akan berpengaruh pada penyusunan dan pelaporan yang dapat menghasilkan informasi yang akurat dan terbebas dari kekeliruan dan kesalahan pencatatan sehingga tercipta keandalan laporan keuangan. Semakin baik penerapan SIP maka informasi yang disajikan dalam laporan keuangan juga akan semakin berkualitas.

2.6.3. Hubungan Transparansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Transparansi merupakan suatu keterbukaan dari pemerintah dalam pembuatan kebijakan keuangan yang pengawasannya dapat dilakukan oleh rakyat maupun DPRD (Mardiasmo, 2009). Transparansi akan menciptakan *horizontal accountability* antara pemerintah daerah dan masyarakat sehingga akan tercipta pemerintah daerah yang bersih, efektif, efisien, akuntabel, dan responsif terhadap aspirasi masyarakat (Sumarsono, 2009).

Segala bentuk hasil kinerja pemerintah akan disusun dan dilaporkan dalam bentuk laporan keuangan dengan menerapkan transparansi agar tidak terjadi kecurigaan masyarakat atas penggunaan sumber daya publik. Dalam pelaporan keuangan juga akan terhindar dari kecurangan sehingga tercipta laporan keuangan yang andal dan relevan. Maka dari itu transparansi berperan penting dalam proses pelaporan keuangan pemerintah daerah sehingga tercipta laporan keuangan yang berkualitas.

2.6.4. Hubungan Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) adalah suatu bentuk penggambaran yang ada pada manusia seperti ilmu, keterampilan, perilaku maupun pengalaman dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab serta bagiannya dalam suatu pekerjaan tertentu dengan efektif (Wirawan, 2009). Kompetensi SDM sangat diperlukan terutama dalam penyusunan dan pelaporan keuangan pemerintah. Kompetensi yang meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap dapat digunakan oleh seorang pegawai yang terlibat langsung dalam proses penyusunan dan pelaporan keuangan. Dengan adanya SDM yang berkompeten akan mencerminkan kinerja pemerintah yang baik untuk menghasilkan informasi yang berkualitas dalam laporan keuangan.

2.7. Penelitian Terdahulu

Saat ini sudah banyak penelitian yang dilakukan mengenai kualitas LKPD, diantaranya penelitian oleh Asril (2017) dengan judul “Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah, dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Medan”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas LKPD, sedangkan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah dan sistem pengendalian intern pemerintah tidak berpengaruh terhadap kualitas LKPD Kota Medan.

Penelitian lain oleh Wardani (2017) dengan judul “Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD), Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada SKPD Kabupaten Labuhanbatu)”. Hasil penelitian menunjukkan kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas LKPD, pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh negatif signifikan terhadap kualitas LKPD, sedangkan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah dan sistem pengendalian intern tidak berpengaruh terhadap kualitas LKPD pada SKPD Kabupaten Labuhanbatu.

Penelitian lain oleh Septiningtyas (2017) dengan judul “Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Kendal)”. Hasil penelitian menyatakan bahwa akuntabilitas, transparansi, dan sistem pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap kualitas LKPD, sedangkan pemahaman standar akuntansi pemerintahan berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas LKPD dalam OPD Kabupaten Kendal.

Selain itu, penelitian oleh Triyanti (2017) dengan judul “Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia di Bidang Akuntansi dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus pada Pemerintah Kabupaten Magelang)”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia di bidang akuntansi dan sistem pengendalian

internal berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) pada SKPD di Kabupaten Magelang.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Amalia (2017) dengan judul “Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), Transparansi, Pelatihan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Medan. Hasil penelitian menyatakan bahwa pemahaman SAP, transparansi dan pelatihan berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan satuan kerja perangkat daerah kota Medan.

Tabel 2.1.

Penelitian Terdahulu

Peneliti	Variabel	Objek	Hasil Penelitian
Asril (2017)	Variabel Independen: X1= Kompetensi Sumber Daya Manusia X2= Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah X3= Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Variabel Dependen: Y= Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	SKPD Kota Medan	Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas LKPD, penerapan sistem akuntansi keuangan daerah dan sistem pengendalian intern pemerintah tidak berpengaruh terhadap kualitas LKPD Kota Medan.
Wardani (2017)	Variabel Independen: X1= Kompetensi Sumber Daya Manusia X2= Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah X3= Pemanfaatan Teknologi Informasi X4= Sistem Pengendalian Intern	SKPD Kabupaten Labuhanbatu	Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas LKPD, pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh negatif signifikan terhadap kualitas LKPD, penerapan sistem

	Variabel Dependen: Y= Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah		akuntansi keuangan daerah dan sistem pengendalian intern tidak berpengaruh terhadap kualitas LKPD pada SKPD Kabupaten Labuhanbatu.
Septiningtyas (2017)	Variabel Independen: X1= Akuntabilitas X2= Transparansi X3= Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan X4= Sistem Pengendalian Internal Variabel Dependen: Y= Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	OPD Kabupaten Kendal	Akuntabilitas, transparansi, dan sistem pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap kualitas LKPD di Kabupaten Kendal, sedangkan pemahaman standar akuntansi pemerintahan berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas LKPD di Kabupaten Kendal.
Triyanti (2017)	Variabel Independen: X1= Kompetensi Sumber Daya Manusia di Bidang Akuntansi X2= Sistem Pengendalian Internal Variabel Dependen: Y= Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	SKPD Kabupaten Magelang	Kompetensi sumber daya manusia di bidang akuntansi dan sistem pengendalian internal berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) pada SKPD di Kabupaten Magelang.
Amalia (2017)	Variabel Independen: X1= Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan X2= Transparansi X3= Pelatihan Variabel Dependen:	SKPD Kota Medan	Pemahaman standar akuntansi pemerintahan, transparansi, dan pelatihan berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan satuan

	Y= Kualitas Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah		kerja perangkat daerah Kota Medan.
--	--	--	------------------------------------

2.8. Pengembangan Hipotesis

2.8.1. Pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Dalam PP No. 60 Tahun 2008 menyatakan bahwa Sistem Pengendalian Internal adalah suatu proses dari kegiatan oleh para atasan maupun pegawai-pegawai yang dilakkan terus menerus yang memberikan keyakinan dalam mencapai tujuan organisasi kemudian direalisasikan dalam bentuk aktivitas yang dilakukan dengan memperhatikan keefisienan dan keefektifitasan, menjaga laporan keuangan agar tetap andal, menjaga asset Negara, dan terus taat pada peraturan perundangan. Dengan adanya pelaksanaan dan kepatuhan pada SPI maka penyelenggaraan penyusunan dan pelaporan keuangan pemerintah daerah dapat menjamin kepatuhan terhadap peraturan perundangan dan menjamin keandalan laporan keuangan.

Hasil penelitian Triyanti (2017) di Kabupaten Magelang membuktikan bahwa SPI berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Magelang. Berdasarkan teori yang didukung hasil penelitian sebelumnya, maka perumusan hipotesis adalah sebagai berikut:

Ha₁: Sistem Pengendalian Internal berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah

2.8.2. Pengaruh Transparansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Mardiasmo (2009) menyatakan bahwa transparansi merupakan suatu keterbukaan dari pemerintah daerah dalam pembuatan kebijakan mengenai keuangan yang pengawasannya dapat dilakukan oleh rakyat maupun DPRD. Adanya keterbukaan terhadap proses penyusunan dan pelaporan keuangan pemerintah maka dapat menghasilkan informasi yang dapat diakses oleh semua pihak dengan memperhatikan kualitas informasi dalam laporan keuangan tersebut.

Hasil penelitian Amalia (2017) di Kota Medan membuktikan bahwa transparansi berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan satuan kerja pemerintah daerah Kota Medan. Berdasarkan teori yang didukung hasil penelitian sebelumnya, maka perumusan hipotesis adalah sebagai berikut:

Ha₂: Transparansi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah

2.8.3. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut Wirawan (2009) kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) yaitu suatu bentuk penggambaran yang ada pada manusia seperti ilmu, keterampilan, perilaku maupun pengalaman dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab serta bagiannya dalam suatu pekerjaan tertentu dengan efektif. Adanya kompetensi SDM akan menghasilkan laporan keuangan yang informatif

sehingga berguna dan dipakai oleh pihak internal maupun eksternal pemerintahan dalam pengambilan keputusan.

Hasil penelitian Asril (2017) di Kota Medan, Wardani (2017) di Kabupaten Labuhanbatu, dan Triyanti (2017) di Kabupaten Magelang membuktikan bahwa kompetensi SDM berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan teori yang didukung hasil penelitian sebelumnya, maka perumusan hipotesis adalah sebagai berikut:

Ha3: Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah